

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara disebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mempublikasikan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan dalam satu periode kepada para pemangku kepentingan. Banyak pihak yang membutuhkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasi oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2005. laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh badan pemeriksa keuangan (BPK). adapun komponen laporan keuangann yang disampaikan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2017:2) “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Harahap (2015: 105) “Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.”

Wujud pertanggungjawaban pemerintah, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menyampaikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang organisasi masyarakat, bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kemudian, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan salah satu tujuan dari pemerintahan daerah yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga, upaya

nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah harus berkualitas, karena ada banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan yang di publikasikan oleh pemerintah daerah dengan kegunaan yang berbeda-beda. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 pengguna laporan keuangan pemerintahan antara lain: masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran- ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

“Sukmaningrum, (2009) menegaskan bahwa Karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif antara lain:

“(1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidak hematatan, ketidak efisienan, dan ketidak efektifan”

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Menurut penelitian Soimah, (2014) “sebagai wujud dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, sumber daya manusia merupakan elemen dari organisasi yang memiliki peran sangat penting”. Sehingga, harus dapat dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia tersebut dapat dijalankan sebaik mungkin guna membantu upaya pencapaian yang dimaksud oleh organisasi bersangkutan. Selain, kualitas sumber daya manusia yang bagus sistem pengendalian intern pemerintah pun harus sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Armando, 2013;

Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka pembinaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus (*series of actions and on going basis*). Disamping itu, juga diperlukan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari beberapa unsur, diantaranya PP Nomor 60 Tahun 2008 : (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan pengendalian intern. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, bahwa seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah dilakukan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik disebut dengan Pengawasan Intern. Namun, yang terjadi di masyarakat yang menggambarkan pengelolaan keuangan belum berjalan sepenuhnya antara lain, tingkat korupsi yang masih tinggi, adanya kebocoran anggaran yang timbul akibat praktek pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan anggaran belanja yang tersedia, sementara penerima anggaran harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Akibatnya penerima anggaran berusaha untuk memperoleh bukti transaksi guna mendukung pertanggungjawaban realisasi anggaran sebagai wujud akuntabilitas keuangan instansi pemerintah daerah yang diragukan kebenarannya. Sehingga diperlukannya alat pengendali yang disebut dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Widyarningsih, 2009. Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Nur Yasin menjelaskan bahwa akar permasalahan rendahnya kualitas dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia adalah kegagalan Kementerian, Lembaga Negara, BUMN/BUMD, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Insani tahun, 2010.

Hal ini membuktikan bahwa masih rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia dan pengendalian intern pemerintah. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem

pengendalian akuntansi dan pelaporan yang terdiri dari: pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung sumber daya manusia yang memadai.

Selain wajib untuk menggunakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sumber daya manusia harus mampu memanfaatkan teknologi informasi. Pesatnya kemajuan teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas, dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Menurut Widjanto (2018: 89 dalam Sembiring, 2013) “secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan. Selain itu dapat menyimpan data dalam jumlah besar, meminimalisir terjadinya kesalahan, dan biaya pemrosesan yang lebih rendah”.

Setelah melakukan pengamatan bahwasannya di dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Palembang sumber daya manusianya kurang dan pemanfaatan teknologi informasinya juga banyak laptop yang tidak terpakai, pengendalian internalnya juga mengalami kelemahan, maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul tersebut karena penulis ingin mengetahui apakah sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Kurang terpenuhinya karakteristik kualitatif pengelolaan keuangan pada pemerintahan daerah dikarenakan kekurangan sumber daya manusia pengelola keuangan khususnya yang berlatar belakang akuntansi, penempatan sumber daya manusia yang keliru, tingkat pemahaman dasar staf mengenai administrasi, sarana dan prasarana serta proses pendidikan di perguruan tinggi untuk mendukung pengembangan akuntansi sektor publik masih membutuhkan perbaikan mutu. Sehingga, pemerintah sebagai pelaksana pengelolaan keuangan di daerah masih mengalami kekurangan sumber daya manusia berkualitas dalam pengelolaan keuangan. Kurangnya sumber daya manusia ini disebabkan oleh euforia pemekaran daerah yang meningkatkan kebutuhan sumber daya manusia pengelolaan keuangan daerah minim dan terpaksa harus dibagi, disamping adanya inkonsisten peraturan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Rendy Riandani (2017) yang mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Liza Mutiana, (2017). bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Noprial Maksyur. (2015) tentang pemanfaatan teknologi informasi yang mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas penulis tertarik mengangkat judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang.**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Palembang?
2. sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Palembang?
3. dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Palembang?
4. Apakah Kualitas sumber daya manusia, Sistem pengendalian intern, dan Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Palembang?

1.3 BATASAN MASALAH

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai pengaruh kualitas

sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Palembang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis secara parsial pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari sebagai berikut:

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Palembang melalui kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi sehingga tujuan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Palembang dapat tercapai.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam berpikir dan menjadi bahan bagi pihak yang berkepentingan serta menambah literatur perpustakaan sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

3. Bagi Lembaga

Bermanfaat sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian lebih lanjut dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya berkonsentrasi pada ilmu akuntansi dan yang berminat dengan pembahasan mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.